



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Kapten A. Rival No. 51
Palembang - 30129

Telp. (0711) 352005, 363125
Kotak Pos : 1132

Fax : (0711) 363125
E-Mail : dishubsumsel2019@gmail.com
Home Page : <http://www.dishub.sumseiprov.go.id>

Palembang, 28 April 2026

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah
Cq. Kepala BAPPEDA Provinsi
Sumatera Selatan
di –
Palembang

SURAT PENGANTAR

Nomor : 000.S.3-1/3261/1/Dishub/2026

No.	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Triwulan I Tahun Anggaran 2026.	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat, sebagai bahan proses lebih lanjut. Demikian atas perkenannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

MUSNI WJAYA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690608 199009 1 001

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN BULAN MARET/TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2026

Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Tahun 2026					Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong	
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan						Realisasi Fisik (%)
							(Rp)	(%)					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	
I	Bidang Perhubungan					45,331,787,104	6,832,714,294	15.07	16.18				
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase meningkatnya pelayanan urusan pemerintah daerah provinsi	%	90%		36,836,494,009	6,785,826,214	18.42	19.75				
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Kinerja Perangkat Daerah	%	75%		240,000,000	19,845,000	8.27	8.75				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3 Dokumen		65,000,000	0	0.00	0.00	Palembang		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen		30,000,000	0	0.00	0.00	Palembang		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen		25,000,000	0	0.00	0.00	Palembang		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen		30,000,000	19,845,000	66.15	70.00	Palembang		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen		25,000,000	0	0.00	0.00	Palembang		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1 Laporan		40,000,000	0	0.00	0.00	Palembang		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1 Laporan		25,000,000	0	0.00	0.00	Palembang		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Meningkatnya pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	%	85%		25,162,152,960	5,784,797,542	22.99	24.55				

8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	225 Orang/Bulan		24,697,152,960	5,782,837,042	23.41	25.00	DAU/APBD	Palembang		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1 Dokumen		400,000,000	1,960,500	0.49	1.00	APBD	Palembang		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1 Laporan		25,000,000	0	0.00	0.00	APBD	Palembang		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
11	Pengetolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1 Dokumen		20,000,000	0	0.00	0.00	APBD	Palembang		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1 Dokumen		20,000,000	0	0.00	0.00	APBD	Palembang		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
III Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													
13	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	%	83%		208,000,000	0	0.00	0.00				
14	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1 Dokumen		118,000,000	0	0.00	0.00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
IV Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
15	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	%	80%		189,460,000	0	0.00	0.00				
16	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10 Orang		94,000,000	0	0.00	0.00	APBD	Sumsel dan Luar Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
V Administrasi Umum Perangkat Daerah													
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	%	85%		663,000,000	90,534,609	13.66	14.20				
18	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10 Paket		30,000,000	0	0.00	0.00	APBD	Palembang		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
19	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2 Paket		48,000,000	0	0.00	0.00	APBD	Palembang		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
			Paket	1 Paket		40,000,000	0	0.00	0.00	APBD	Palembang		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab

20	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1 Laporan		56,000,000	13,880,000	24.79	26.00	APBD	Palembang		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1 Laporan		468,000,000	76,654,609	16.38	17.00	APBD	Sumsel dan Luar Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
22	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1 Dokumen		21,000,000	0	0.00	0.00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
VI Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1 Laporan	90%	5,736,381,049	863,905,813	15.09	16.53		Palembang		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1 laporan		868,981,049	111,925,813	12.88	14.00	APBD	Palembang		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1 laporan		4,852,400,000	751,980,000	15.50	17.00	APBD	Palembang		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
VII Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	12 Unit	78%	647,500,000	26,743,250	4.13	5.16				
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	32 Unit		244,000,000	19,745,500	8.09	10.00	APBD	Palembang		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
28	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	Unit	1 Unit		76,000,000	0	0.00	0.00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
29	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	Unit	1 Unit		31,500,000	0	0.00	0.00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1 Unit		83,000,000	0	0.00	0.00	APBD	Palembang		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	412 Unit		100,000,000	0	0.00	0.00	APBD	Palembang		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
VIII Peningkatan Pelayanan BLUD													
32	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1 Unit kerja	90%	4,000,000,000	0	0.00	0.00	BLUD	Palembang dan Banyuasin		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab

II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 1 Juta Keperangkatan	Rasio	14,23 Rasio		6,835,384,495	32,194,274	0.47	0.58				
I	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Persentase Meningkatnya Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	%	40%		367,300,000	0	0.00	0.00				
33	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen	1 Dokumen		120,000,000	0	0.00	0.00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
34	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Dokumen	1 Dokumen		247,300,000	0	0.00	0.00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
II	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Meningkatnya Ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	%	40%		2,496,278,154	0	0.00	0.00				
35	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Unit	50 Unit		2,496,278,154	0	0.00	0.00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
III	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah terminal tipe B yang dikelola	Terminal	7 Terminal		982,000,000	12,743,294	1.30	1.46				
36	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Terminal	7 Terminal		717,000,000	12,743,294	1.78	2.00	APBD	Sumsel	Kemiskinan Ekstrem	Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
37	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Terminal	7 Terminal		265,000,000	0	0.00	0.00	APBD	Sumsel	Kemiskinan Ekstrem	Faktor Penghambat, adanya proses perubahan anggaran
IV	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	%	80%		424,300,000	15,417,980	3.63	4.73				
38	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan	1 Laporan		58,000,000	0	0.00	0.00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
39	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	1 Laporan		334,700,000	15,417,980	4.61	6.00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
40	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan	1 Laporan		31,600,000	0	0.00	0.00	APBD	Palembang		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
V	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Persentase Meningkatnya Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lints (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	%	33%	-	33,480,000	0	0.00	0.00				
41	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Pengawasan Andalalin	Laporan	1 Laporan	-	33,480,000	0	0.00	0.00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab

VI	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Meningkatnya Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	%	80%		100,000,000	4,033,000	4.03	5.00							
42	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	1 Laporan		100,000,000	4,033,000	4.03	5.00	APBD	Sumsel				Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab	
VII	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Meningkatnya Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	%	80%		2,370,486,341	0	0.00	0.00							
43	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Laporan	1 Laporan		493,400,000	0	0.00	0.00	APBD	Sumsel				Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab	
44	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Unit	3 Unit		1,877,086,341	0	0.00	0.00	APBD	Sumsel				Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab	
VIII	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Meningkatnya Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	%	52%		61,540,000	0	0.00	0.00							
45	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Unit	2 Unit		61,540,000	0	0.00	0.00	APBD	Sumsel				Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab	
III	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah Trip Perjalanan Kapal	Trip	3.856 Trip		1,467,290,000	9,000,192	0.61	0.00							
I	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Antar Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Persentase Meningkatnya Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Antar Daerah Provinsi yang Bersangkutan	%	70%		162,112,000	0	0.00	0.00							
46	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan	Laporan	1 Laporan		162,112,000	0	0.00	0.00	APBD	Sumsel				Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab	

II	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Meningkatnya Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	%	Laporan	70%		89,300,000	0	0.00	0.00	APBD	Sumsel	Inflasi	Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
47	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kab/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan disetujui Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi		Laporan	1 Laporan		89,300,000	0	0.00	0.00	APBD	Sumsel	Inflasi	Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
III	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas	Persentase Meningkatnya Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas	%		70%		78,360,000	0	0.00	0.00				
48	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Terkait Baerupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen		1 Dokumen		78,360,000	0	0.00	0.00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
IV	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Meningkatnya Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	%		20%		652,936,000	1,358,212	0.21	1.00				
49	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	Unit		1 Unit		652,936,000	1,358,212	0.21	1.00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab

V	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Meningkatnya Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	%	35%		342,600,000	7,641,980	2.23	3.00						
50	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan	1 Laporan		342,600,000	7,641,980	2.23	3.00	APBD	Sumsel			Faktor Penghambat, belum dilakukan penyerahan P3D Pelabuhan Pengumpulan Regional	
VI	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpulan Regional	Persentase Meningkatnya Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpulan Regional	%	35%		141,982,000	0	0.00	0.00						
51	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpulan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpulan Regional	Laporan	1 Laporan		141,982,000	0	0.00	0.00	APBD	Sumsel			Faktor Pendorong, Akan dilakukannya perbaikan kapal	
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Jumlah Penumpang Kereta Api	Orang	2.025.087 Orang		192,618,600	5,693,614	2.96	3.30						
I	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Meningkatnya Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	%	30%		40,000,000	0	0.00	0.00						
52	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanya Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kerta Api yang Jaringanya Kewenangan Provinsi	Dokumen	1 Dokumen		40,000,000	0	0.00	0.00	APBD	Sumsel			Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab	
II	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Perkeretaapian Provinsi	Persentase Meningkatnya Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Perkeretaapian Provinsi	%	30%		89,000,000	0	0.00	0.00						
53	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Dokumen	1 Dokumen		89,000,000	0	0.00	0.00	APBD	Sumsel			Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab	

III Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase Meningkatnya Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	%	30%		63,618,600	5,693,614	8.95	10.00							Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
54	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	1 Dokumen		63,618,600	5,693,614	8.95	10.00	APBD	Sumsel					
Jumlah						45,331,787,104	6,832,714,294	15.07	16.18							

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

MUSNI WIJAYA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690608 199009 1 001

LAPORAN REALISASI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (IKU DAN IKD)

TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2026

Perangkat Daerah : DINAS PERHUBUNGAN

NO	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target	Realisasi TW I	Capaian TW I %	Faktor Penghambat / Pendorong	Keterangan
1	2	3	4	5			8	8
1	Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur konektivitas yang berkualitas	V/C Rasio Jalan Provinsi	Rasio	0,388	0,382	98,45%	Faktor Penghambat : kapasitas jalan tidak sebanding dengan pertumbuhan volume kendaraan Faktor Pendorong : Dukungan kebijakan pengaturan lalu lintas	Bidang Lalu Lintas
		Rata - rata load factor angkutan umum	%	71,50	68,36%	96%	Faktor Penghambat : Minat masyarakat terhadap angkutan umum masih rendah Faktor Pendorong : Sosialisasi dan kampanye penggunaan angkutan umum	1. Bidang Angkutan 2. Bidang Keretaapi 3. Bidang Pelayaran
		Rasio Konektivitas Transportasi Provinsi	Rasio	0,660	0,62	93,93%	Faktor Penghambat :Jaringan transportasi belum menjangkau seluruh wilayah Faktor Pendorong : Pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi	Bidang Pelayaran, Bidang Angkutan
2	Meningkatnya Layanan Transportasi							

Palembang, April 2026
Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Sumatera Selatan

MUSINI WIJAYA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690608 199009 1 001

SISTEMATIKA
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN APBD
DAN APBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2026
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN



SISTEMATIKA

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN APBD DAN APBN PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2026 DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

I. PENDAHULUAN

a. Gambaran Umum Perangkat Daerah

1. Tujuan

Tujuan jangka menengah pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan yaitu Meningkatnya pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas.

2. Sasaran

- a) Meningkatnya Keselamatan Transportasi Provinsi
- b) Meningkatnya Layanan Transportasi
- c) Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah

3. Belanja Program APBD dan Program APBN

Total Pagu Anggaran Belanja Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 45.331.787.104,- (empat puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat rupiah).

Belanja Daerah pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 4 Program, 25 Kegiatan dan 54 Sub Kegiatan

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi;
- b) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
- c) Program Pengelolaan Pelayaran;
- d) Program Pengelolaan Perkeretaapian.

4. Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan target yang tercantum pada RPJMD Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, Indikator yang menjadi tugas Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

- a) Rasio Konektivitas Transportasi;
- b) Rata-rata Load Factor Angkutan Umum;
- c) V/C Rasio Jalan Provinsi.

5. Kegiatan Perangkat Daerah Berdasarkan Kewilayahan (lokasi)

Berdasarkan kewilayahan, Program/Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan tersebar di beberapa lokasi, antara lain sebagai berikut :

a) Kota Palembang

Terdapat 25 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran;
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
- Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD;
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- Penyediaan Bahan/Material;
- Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

b) Semua Kab/Kota, Kecamatan/Kelurahan

Terdapat 29 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
- Pemeliharaan Aset Tak Berwujud;
- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD;
- Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi;
- Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi;
- Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang);
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Penunjang);
- Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi;
- Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi;
- Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi;
- Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin;
- Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal;
- Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi;
- Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;

- Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izn Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi;
- Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kab/Kota dalam Daerah Provinsi;
- Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional;
- Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional;
- Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi;
- Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi;
- Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

b. Latar Belakang Penyusunan Laporan

Sistematika Laporan Hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan APBD Triwulan I Tahun Anggaran 2026 (Dinas Perhubungan)

Maksud dan Tujuan Penyusunan laporan ini adalah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun berjalan serta sebagai bahan masukan SKPD dalam menyusun perencanaan tahun berikutnya.

II. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

Hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 sampai dengan Triwulan ini pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut :

a. Perbandingan antara realisasi (keuangan, fisik dan kinerja) dengan target kinerja program/kegiatan yang tercantum pada DPA Perangkat Daerah dan DIPA APBN :

1) Realisasi Belanja Perangkat Daerah dana APBD Provinsi Sumatera Selatan

a) Realisasi Total Belanja

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target di Triwulan ini	Realisasi Triwulan ini	Target Triwulan ini	Realisasi Triwulan ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Belanja	45.331.787.104	6.832.714.294	15.00%	15.07%	20.00%	16.18%

b) Realisasi Belanja (Operasi, Modal, Tidak Terduga dan Transfer)

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target di Triwulan ini	Realisasi Triwulan ini	Target Triwulan ini	Realisasi Triwulan ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Belanja Operasi	42.628.387.104	6.832.714.294	15.00%	16.02%	20.00%	16.18%
Belanja Modal	2.703.400.000	0	15.00%	0%	20.00%	0%
Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-	-
Belanja Transfer	-	-	-	-	-	-

No	Interval Nilai Realisasi Terhadap Target	Kriteria Penilaian Realisasi	Status Realisasi
1	90% ≤ 100%	Tinggi	Hijau
2	66% ≤ 90%	Sedang	Kuning
3	0% ≤ 65%	Rendah	Merah

2) Realisasi Belanja Perangkat Daerah dana APBN di Provinsi Sumatera Selatan

Nomor Satker / Nama Program/ Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kode Satker	-	-	-	-
Nama Program	-	-	-	-
Nama Kegiatan	-	-	-	-

a) Perbandingan antara realisasi dengan target Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang tercantum pada :

1) RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029;

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	V/C Ratio Jalan Provinsi	Rasio	0,388	0,382	98,45
2	Rata-rata Load Factor Angkutan Umum	Persentase	71,50	68,36	96
3	Rasio Konektivitas Transportasi	Rasio	0,660	0,62	93,93

2) Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029;

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	V/C Ratio Jalan Provinsi	Rasio	0,388	0,382	98,45
2	Rata-rata Load Factor Angkutan Umum	Persentase	71,50	68,36	96
3	Rasio Konektivitas Transportasi	Rasio	0,660	0,62	93,93

b) Penghargaan yang diperoleh Perangkat Daerah

- 1. Bhakti Sosial Donor Darah Tahun 2022.
- 2. Pendukung Kegiatan PERTIKARA Nasional IV Tahun 2022.
- 3. Partisipasi dan Dedikasi dalam Mensukseskan Hari Keluarga Nasional Ke- 30 Tahun 2023.
- 4. Pembina Terbaik I Pemilihan Pelajar Pelopor LLAJ Tingkat Nasional Tahun 2024.

5. Piala Wahana Tata Nugraha Wiratama dari Presiden RI Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.
6. Piagam Penghargaan dari Gubernur Sumatera Selatan Kepada Perangkat Daerah yang Responsif Gender Pada Peringatan Hari Ibu Ke – 97 Tahun 2025.

III. KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

a. Kendala

Adanya penyesuaian anggaran sehingga penyerapan belum maksimal.

b. Tindak Lanjut yang diperlukan

Perlu penyesuaian kerja agar penyerapan anggaran dapat maksimal dan tidak melanggar peraturan yang berlaku.

IV. PENUTUP

Demikianlah penjelasan kami mengenai program/kegiatan yang ada pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan APBD dan APBN Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 untuk menjadi bahan evaluasi, selanjutnya laporan yang lebih terinci menjadi lampiran pada dokumen ini.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

MUSNI WIJAYA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690608 199009 1 001